



RENJA PERUBAHAN

2021

DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP
DAN TENAGA KERJA

@ dpmptspnaker.pangkalpinangkota.go.id



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan dokumen ini dengan baik.

Renja perubahan ini berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 serta RKPD Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang meliputi rasionalisasi belanja guna mendukung pendanaan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Pangkalpinang, pergeseran anggaran kegiatan dan penambahan anggaran kegiatan yang telah dirasionalisasi.

Renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sejatinya untuk

memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas.

Renja perubahan tahun 2021 ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021.

Pangkalpinang, 9 Agustus 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal,
PTSP dan Tenaga Kerja



YAN RIZANA, S.T, M.Si

Pembina

NIP 19760123 200501 1 006

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD	15
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021	19
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	19
3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD	20
3.3 Program dan Kegiatan	21
BAB IV PENUTUP	34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan renja perubahan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Adapun perubahan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi rasionalisasi belanja guna mendukung pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pangkalpinang, pergeseran anggaran kegiatan dan penambahan anggaran kegiatan yang telah dirasionalisasi.

Renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas. Renja ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2021 ini yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);
6. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang;
7. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 39

Tahun 2020 tentang RKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja perubahan adalah sebagai acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021.

Tujuan penyusunan Renja perubahan adalah untuk merumuskan prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatifnya yang akan dilaksanakan di tahun 2021 sehingga tercipta sinergisitas dalam pelaksanaan pemerintahan.

1.4 Sistematikan Penulisan

Dokumen Renja perubahan 2021 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2021

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2021
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

BAB IV PENUTUP

7	Program pelayanan penanaman modal kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	85	IKM	486.828.100,00	62.250.000,00	125.766.450,00	-	188.016.450,00	38,62%
	sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	3880	izin	486.828.100,00	62.250.000,00	125.766.450,00	-	188.016.450,00	38,62%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja									
8	Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	5,15	%	326.122.000,00	-	2.175.000,00	-	2.175.000,00	0,67%
	sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	70	unit usaha	326.122.000,00	0	2.175.000,00	-	2.175.000,00	0,67%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja									
9	Program pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	12.000.300,00	-	-	-	-	0,00%
	sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	8	buku	12.000.300,00	0	-	-	-	0,00%
Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja									
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program (Rp)									
				8.782.449.478,00	787.447.199,00	2.183.024.392,00	-	2.950.471.591,00	20,38%
				TOTAL RATA-RATA DAN CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAMS.D. PROGRAM)					
				PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAMS.D. PROGRAM)					
				Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja					
				20,38% 16,36%					

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- b. penetapan rencana strategis dinas untuk mendukung visi dan misi Kota Pangkalpinang dan kebijakan Wali kota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Kota Pangkalpinang bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- d. penetapan rencana kerja dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang Penanaman Modal, Pelayanan

- Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di lingkungan Kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

Berdasarkan hasil realisasi IKU Tahun Anggaran 2018 s.d. 2020 sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023, maka dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Realisasi IKU Tahun 2018-2020

Tujuan	Sasaran	Indikator	Realisasi	Realisasi	Realisasi
			2018	2019	2020
Meningkatkan Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya daya tarik investasi	Nilai investasi	258.289.557.336	368.638.115.109	2.041.393.876.256
Meningkatnya partisipasi angkatan kerja	Meningkatkan kesempatan kerja masyarakat	Tingkat pengangguran terbuka	4,70%	5,01%	6,93%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) serta Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka dilakukan perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang sejalan dengan RPJMD Perubahan Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

Berdasarkan Renstra Perubahan tersebut, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang melakukan perubahan IKU seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Realisasi IKU Per Januari s.d. Juli 2021

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi Jan-Juli 2021
1.	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	$= \frac{2}{113} \times 100\% = 1,76\%$
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	$= \frac{8}{19} \times 100\% = 42,10\%$
			Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	$= \frac{14}{496} \times 100\% = 2,82\%$
2.	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi		Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	%	$= \frac{43066051201 - 215539253869,12}{215539253869,12}$ $= -80,02\%$
		Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	Milyar Rupiah	43.066.051.201

Untuk mendukung pencapaian IKU diatas, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang memiliki anggaran sebesar Rp.9.137.696.107,00 dengan 9 (Sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Namun guna mendukung pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pangkalpinang, maka dilakukan refocusing anggaran pada 31 Maret 2021 sehingga pagu dinas setelah refocusing menjadi Rp.8.762.449.478,00.

Sehubungan dengan refocusing anggaran tersebut, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang melakukan rasionalisasi kegiatan yang belum prioritas pada tahun 2021, untuk dapat dialihkan dan dianggarkan kembali pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang guna mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan renstra perubahan tahun 2018-2023, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama bulan Januari s.d. Juli 2021, yaitu sebagai berikut:

a. Kendala dalam pencapaian indikator tujuan dinas:

1. Indikator persentase tenaga kerja yang ditempatkan.

Sebagian dari perusahaan swasta ataupun BUMN/BUMD dan instansi pemerintah tidak mempersyaratkan kartu AK-1 dalam setiap penerimaan karyawan/ CPNS, sehingga tidak dapat data yang jelas tentang jumlah pencari kerja yang terdaftar.

2. Indikator Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN.

Jumlah/nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Setiap bulannya, perusahaan wajib melaporkan data realisasi investasi melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) tersebut.

Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkannya; kurangnya pengawasan dan pemantauan dari dinas terhadap seluruh perusahaan serta adanya perubahan nomor telepon dan alamat email, sehingga sulit untuk menghubungi perusahaan tersebut.

b. Kendala dalam pencapaian sasaran dinas

1. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB).

Masih terdapat perusahaan yang tidak mau membayar pesangon karena dampak dari pandemi *Corona Virus Disease* 2019 sehingga kedua belah pihak (perusahaan dan pekerja) tidak ada kesepakatan, maka Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang membuat anjuran untuk menyelesaikan perselisihan di pengadilan hubungan industrial. Kendala lain berkaitan kasus perselisihan hubungan industrial adalah masih terdapat salah satu pihak (perusahaan/pekerja) yang tidak memenuhi panggilan untuk di mediasi di Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyelesaian kasus tersebut.

2. Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB

Kendala yang dihadapi oleh bidang tenaga kerja terkait data perusahaan yang memiliki PP/PKB adalah:

- Banyak perusahaan yang belum memahami tentang PP/PKB sehingga diperlukan bimtek/sosialisasi mengenai penyusunan PP/PKB tersebut;
- Bimtek/sosialisasi PP/PKB perlu dilaksanakan setiap tahunnya tetapi masih terkendala tidak tersedianya anggaran;
- Data jumlah tenaga kerja per perusahaan tidak dapat diambil dari WLKP online sehingga diperlukan monitoring langsung ke perusahaan

3. Nilai realisasi investasi PMDN

Jumlah/nilai realisasi investasi didapatkan dari LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Setiap bulannya, perusahaan wajib melaporkan data realisasi investasi melalui SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) tersebut.

Kendala yang dihadapi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah kurangnya kesadaran perusahaan untuk melaporkannya; kurangnya pengawasan dan pemantauan dari dinas terhadap seluruh perusahaan serta adanya perubahan nomor telepon dan alamat email, sehingga sulit untuk dihubungi.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.

SWOT dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis berupa factor internal dan faktor eksternal. Hasil analisis SWOT isu internal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Kekuatan	Kelemahan
1.	Nilai dan budaya organisasi	Memiliki motto pelayanan kepada stake holder	Inkonsistensi pegawai dalam menerapkan motto pelayanan di pekerjaan sehari-hari
			Adanya potensi gratifikasi dari pemangku kepentingan dalam pelayanan
3.	Kompetensi	Kompetensi pegawai dalam kegiatan teknis sudah mencukupi	Keterbatasan wawasan dan pengalaman pegawai
			Tidak tersedianya anggaran khusus untuk pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kualitas SDM yang ada
4.	Kinerja organisasi	Proses pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu standar pelayanan	Keterbatasan sarana prasarana untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dinas
		Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan, per tri wulan dan per tahun	Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki pihak pemohon untuk mengakses pelayanan perizinan secara elektronik menjadi kendala tersendiri untuk percepatan proses permohonannya
			Masih banyak izin yang belum dilimpahkan dari perangkat daerah lain
			Belum lengkapnya persyaratan awal yang dimiliki pemohon mengharuskan pemohon membuat komitmen dalam jangka waktu tertentu untuk dapat memperoleh perizinan sesuai dengan jenis usahanya melalui lembaga OSS

Sedangkan isu eksternal Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

No.	Aspek	Peluang	Ancaman
1.	Teknologi	Sistem pelayanan perizinan secara online melalui lembaga OSS dan SICANTIK, lebih menjamin pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel	Belum terkoneksinya antar bagian melalui sistem informasi berdampak pada pelaporan data perizinan penanaman modal yang kurang integratif
		Penggunaan website dinas untuk komunikasi pelanggan	survey indeks kepuasan masyarakat dan survey harapan masyarakat belum melalui sistem informasi
2.	Hukum	Perlunya peningkatan kemampuan bagian pengaduan melalui dukungan sistem informasi dan pelatihan	Perubahan peraturan perundang-undangan yang cepat membuat pejabat teknis kurang bisa mengikuti perubahan
			Penerapan sistem outsourcing merugikan pekerja karena tidak ada jaminan keberlanjutan kontrak kerja
3.	Daya saing	Pembuatan mall pelayanan publik guna memberi kemudahan kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan	Meningkatnya persaingan dengan negara tetangga dalam menarik penanam modal
		Banyaknya potensi sumber daya investasi yang dapat dikembangkan	Minimnya kegiatan promosi tentang perizinan dan promosi investasi
		Perlunya survey indeks kepuasan masyarakat dan survey harapan masyarakat melalui sistem informasi manajemen	Rendahnya kualitas tenaga kerja
			Tingginya angka pengangguran

			Tingginya kasus perselisihan hubungan industrial
			Minimnya kerja sama penanaman modal dengan unit usaha
4.	Sosial ekonomi	Refocusing anggaran saat terjadi pandemi COVID-19	Minimnya laporan perkembangan penanaman modal dari perusahaan yang berdampak pada minimnya data realisasi kegiatan usaha yang dilakukan
		Persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan	Belum tersedianya balai latihan kerja
		Kebijakan kemudahan dalam berinvestasi	

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2021

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

RKAP (Rencana Kerja Anggaran Pemerintah) tahun 2021 mencakup 7 (tujuh) prioritas nasional yang merupakan 7 (tujuh) agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024.

Adapun ketujuh agenda tersebut berupa penguatan ketahanan ekonomi; pengembangan wilayah; peningkatan SDM (Sumber Daya Manusia); peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim dan stabilitas politik hukum dan transformasi publik.

Sedangkan tema pembangunan Kota Pangkalpinang mendukung dan selaras dengan tema pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu "Percepatan Pemulihan Ekonomi melalui Pengembangan Potenso Daerah Berbasis Masyarakat dan Peningkatan Pelayanan Dasar". Dukungan dan keselarasan tersebut khususnya terletak pada kesadaran pentingnya pemberdayaan masyarakat guna melakukan percepatan pemulihan ekonomi yang menurun akibat dampak social ekonomi akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019*.

- a. Peningkatan pembangunan infrastuktur public serta optimalisasi penataan ruang daerah;
- b. Perbaikan tata kelola pemerintahan dalam percepatan reformasi birokrasi;
- c. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya daerah;
- d. Pengembangan dan penguatan potensi ekonomi sektor unggulan;
- e. Peningkatan iklim investasi;

- f. Peningkatan produktifitas, daya saing dan potensi komoditas local berbasis ekonomi kreatif;
- g. Penanggulangan kemiskinan dan penguatan perlindungan social kemasyarakatan;
- h. Optimalisasi penanggulangan dan mitigasi bencana serta pemantapan stabilitas keamanan dan ketertiban;
- i. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pengarusutamaan gender;
- j. Peningkatan daya saing dan pelestarian seni budaya daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Tujuan dan sasaran sesuai dengan Renstra Perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 seperti tabel berikut:

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Tahun 2021-2023

N o.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tahun ke		
					2021	2022	2023
1.	Meningkatkan persentase tenaga kerja yang ditempatkan		Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	50	60	70
		Terciptanya hubungan industrial yang harmonis	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	94,55	67,27	76,36
			Persentase perusahaan yang telah memiliki PP/ PKB	%	13,03	16,06	19,09
2.	Meningkatkan laju pertumbuhan realisasi investasi		Laju pertumbuhan realisasi investasi PMDN	%	30	43	50
		Meningkatnya realisasi investasi	Nilai realisasi investasi PMDN	Milyar Rupiah	280	400	600

3.3 Program dan Kegiatan SKPD

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada APBD Perubahan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Tahun 2021

1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		
	2.07.03.2.01		1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
	2.07.03.2.01.01		1.1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
	2.07.03.2.02		2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
	2.07.03.2.02.01		2.1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA		
	2.07.04.2.03		1.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
	2.07.04.2.03.02		1.1	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
	2.07.04.2.05		2.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.04.2.05.01		2.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL		
	2.07.05.2.01		1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.05.2.01.03		1.1	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

	2.07.05.2.02		2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.05.2.02.02		2.1	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
	2.07.05.2.02.04		2.2	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
4.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	2.18.01.2.01		1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2.18.01.2.01.01		1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	2.18.01.2.01.06		1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2.18.01.2.02		2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	2.18.01.2.02.01		2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	2.18.01.2.05		3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	2.18.01.2.05.09		3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	2.18.01.2.06		4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	2.18.01.2.06.01		4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	2.18.01.2.06.02		4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.18.01.2.06.04		4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
	2.18.01.2.06.05		4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	2.18.01.2.06.09		4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	2.18.01.2.08		5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.18.01.2.08.02		5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	2.18.01.2.08.03		5.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	2.18.01.2.08.04		5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	2.18.01.2.09		6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	2.18.01.2.09.01		6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	2.18.01.2.09.09		6.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	2.18.01.2.09.10		6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
	2.18.02.2.02		1.	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
	2.18.02.2.02.02		1.1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
6.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
	2.18.03.2.01		1.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.03.2.01.01		1.1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
7.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		
	2.18.04.2.01		1.	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
	2.18.04.2.01.01		1.1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

8.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		
	2.18.05.2.01		1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.05.2.01.03		1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
9.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
	2.18.06.2.01		1.	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	2.18.06.2.01.01		1.1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Tabel 3.4
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu APBDP 2021

No.	Urusan Pemerintah Daerah / Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	*Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Prakiraan Maju Tahun 2022		
					Pagu Indikatif (Rp)		Suber Dana	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Keterangan	
					Sebelum Perubahan*	Setelah Perubahan					8 = 7 - 6 (bertambah/ (berkurang))
6	7	8 = 7 - 6	9	10	11	12					
URUSAN TENAGA KERJA											
1	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi 8.6.1* persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan		5,93	181.407.850,00	119.642.650,00	(61.765.200,00)				
	Kegiatan pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Jumlah Pelatihan berdasarkan unit kompetensi yang dilaksanakan		3	163.992.650,00	119.642.650,00	(44.350.000,00)				
	Sub kegiatan proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	jumlah pencari kerja yang dilatih	kota Pangkalpinang	45	163.992.650,00	119.642.650,00	(44.350.000,00)				pagu setelah refocusing 119.642.650,00
	Kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta	persentase LPK yang terakreditasi		33,33	17.415.200,00	-	(17.415.200,00)				

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/ kualifikasi pada unit kerjanya</i>		100	40.000.000,00	5.135.200,00	(34.864.800,00)			
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian</i>		100	40.000.000,00	5.135.200,00	(34.864.800,00)			
sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	DPMPTSP & NAKER	4	40.000.000,00	5.135.200,00	(34.864.800,00)			pagu setelah refocusing 5.135.200,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	<i>persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran</i>		100	165.443.441,00	183.282.562,00	17.839.121,00			
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Presentase terpenuhinya administrasi Umum</i>		100	165.443.441,00	183.282.562,00	17.839.121,00			
sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DPMPTSP & NAKER	13	4.000.000,00	4.000.000,00	-			
sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	DPMPTSP & NAKER	3	13.140.780,00	75.499.000,00	62.358.220,00			pagu setelah refocusing 0
sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	DPMPTSP & NAKER	2	27.187.330,00	30.275.230,00	3.087.900,00			pagu setelah refocusing 26.177.330,00
sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	DPMPTSP & NAKER	5	9.524.000,00	12.224.000,00	2.700.000,00			-

sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	DPMPTSP & NAKER	12	111.591.331,00	61.284.332,00	(50.306.999,00)	pagu setelah refocusing 61.284.332,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik		100	2.581.645.000,00	2.661.095.600,00	79.450.600,00	
kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Terepenuhinya Penyediaan Jasa</i>		100	186.130.000,00	197.580.200,00	11.450.200,00	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	DPMPTSP & NAKER	78	77.000.000,00	69.770.000,00	(7.230.000,00)	-
sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	DPMPTSP & NAKER	5	19.770.000,00	28.305.000,00	8.535.000,00	pagu setelah refocusing 25.305.000,00
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	DPMPTSP & NAKER	78	89.360.000,00	99.505.200,00	10.145.200,00	pagu setelah refocusing 90.555.200,00
kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah</i>		100	2.395.515.000,00	2.463.515.400,00	68.000.400,00	
sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	DPMPTSP & NAKER	12	127.789.000,00	128.087.800,00	298.800,00	pagu setelah refocusing 128.087.800,00

	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	DPMPTSP & NAKER	1	2.220.230.000,00	2.292.230.000,00	72.000.000,00					
	sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara	DPMPTSP & NAKER	1	47.496.000,00	43.197.600,00	(4.298.400,00)					pagu setelah refocusing 43.197.600,00
5	program pengembangan iklim penanaman modal	persentase peningkatan jumlah investor		30	48.768.250,00	44.067.050,00	(4.701.200,00)					
	kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah peta potensi investasi Kabupaten/Kota		1	48.768.250,00	44.067.050,00	(4.701.200,00)					
	sub kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	jumlah dokumen peta potensi dan peluang investasi	kota pangkalpinang	1	48.768.250,00	44.067.050,00	(4.701.200,00)					pagu setelah refocusing 44.067.050,00
6	program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di Kota		30	211.950.250,00	110.884.350,00	(101.065.900,00)					
	kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah strategi promosi yang dilaksanakan		1	211.950.250,00	110.884.350,00	(101.065.900,00)					
	sub kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	jumlah dokumen yang disusun	kota pangkalpinang	1	211.950.250,00	110.884.350,00	(101.065.900,00)					pagu setelah refocusing 180.425.250,00

7	program pelayanan penanaman modal	indeks kepuasan masyarakat	85	538.263.100,00	486.828.100,00	(51.435.000,00)			
	kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>jumlah pelayanan Perizinan dan Non terpadu satu pintu di Kabupaten/ Kota</i>	1	538.263.100,00	486.828.100,00	(51.435.000,00)			
	sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	jumlah izin yang diterbitkan	4060	538.263.100,00	486.828.100,00	(51.435.000,00)			pagu setelah refocusing 486.828.100,00
8	program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	<i>persentase perusahaan yang melaporkan LKPM</i>	5,15	326.122.000,00	326.122.000,00	-			
	kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sertifikat ISO yang diterima</i>	1	326.122.000,00	326.122.000,00	-			
	sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah unit usaha yang di pantau berdasarkan izin yang diberikan	70	326.122.000,00	326.122.000,00	-			-

9	program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase jenis izin yang diterbitkan secara online	76,27	12.000.300,00	12.000.300,00	12.000.300,00	-	-	-	pagu setelah refocusing 8.762.449.478, 00
	sub kegiatan, Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	persentase data dan informasi perizinan dan non perizinan di Kabupaten/ kota	50	12.000.300,00	12.000.300,00	12.000.300,00	-	-	-	
		jumlah website penanaman modal yang dikelola	1	12.000.300,00	12.000.300,00	12.000.300,00	-	-	-	
		TOTAL		9.137.696.107,00	9.217.015.971,00	79.319.864,00				

BAB IV

PENUTUP

Renja perubahan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja meliputi rasionalisasi belanja guna mendukung pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Pangkalpinang, pergeseran anggaran kegiatan dan penambahan anggaran kegiatan yang telah dirasionalisasi.

Pada renja perubahan terdapat anggaran sebesar Rp.9.217.015.971,00 dengan 9 (Sembilan) program, 17 (tujuh belas) kegiatan, serta 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan. Renja perubahan ini akan menjadi salah satu acuan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan Tahun 2021.